

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
MELALUI PEWARISAN DI KOTA BUKITTINGGI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



Oleh :

WAHYUL IKRAR

1920123053

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

## ABSTRAK

### **Wahyul Ikrar : Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Di Kota Bukittinggi**

Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan pengenaan pajak dalam peralihan hak milik pewarisan di Kota Bukittinggi dan Mengapa peralihan hak milik melalui pewarisan di Kota Bukittinggi dikenai pajak Penghasilan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan pengenaan pajak dalam peralihan hak milik pewarisan di Kota Bukittinggi dan untuk mengetahui dan memahami pajak penghasilan yang dikenakan dalam proses pewarisan di Kota Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data primer yang telah didapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah berkaitan. Dari hasil penelitian penulis, Pengenaan pajak BPHTB menggunakan Self Assessment System, obyek pajak dari BPHTB khususnya pajak warisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Landasan pengenaan pajak PPh terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh yang menjadi subjek pajak adalah salah satunya Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, sedangkan pada Pasal 4 Ayat (3) UU PPh yang dikecualikan sebagai objek pajak salah satunya adalah warisan. Dari dua Pasal dalam satu Undang-undang tersebut diatas terdapat dua hal yang berseberangan dimana hendaknya Notaris/PPAT sebagai pelayan masyarakat hendaknya membantu mempermudah masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengenaan pajak dalam proses pewarisan.

Kata Kunci : Peralihan hak Waris, Pajak Penghasilan, BPHTB

## ABSTRACT

### Wahyul Ikrar : Imposition of Income Tax in the Transfer of Land Rights through Inheritance in Bukittinggi City

Transfer of title to land can occur due to legal acts and legal events. Transfer of title to land due to legal events, occurs when the holder of title to land dies, then automatically or without an intentional legal act from the right holder, property rights transfer to the heirs of the right holder. The formulation of the problem in this study is: How are the provisions for imposing taxes in the transfer of inheritance property rights in Bukittinggi City and Why is the transfer of property rights through inheritance in Bukittinggi City subject to Income tax? This study aims to know and analyze how the provisions for imposing taxes in the transfer of inheritance property rights in Bukittinggi City and to know and understand the income tax imposed in the inheritance process in Bukittinggi City. This type of research is empirical juridical research conducted by researching, and collecting primary data that has been obtained through direct observation of related problems. This type of research is empirical juridical research conducted by researching, and collecting primary data that has been obtained through direct observation of related problems. This type of research is empirical juridical research conducted by researching, and collecting primary data that has been obtained through direct observation of related problems. From the results of the author's research, the imposition of BPHTB tax uses the Self Assessment System, the tax object of BPHTB, especially inheritance tax as stated in Article 85 paragraph (2) letter a of Law Number 28 of 2009 and Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. The basis for the imposition of income tax is contained in Article 2 paragraph (1) of the Income Tax Law, which is the subject of tax, one of which is inheritance that has not been divided as a single entity replacing the rightful, while in Article 4 paragraph (3) of the Income Tax Law, one of which is inheritance. From the two articles in one of the laws mentioned above, there are two opposite things where the Notary / PPAT as a public servant should help make it easier for the community so that there is no inequality in the imposition of taxes in the inheritance process.

Keywords : Transfer of Inheritance rights, Income Tax, BPHTB